

DAFTAR PUSTAKA

- A.Yogaswara dan Ahmad jalidu Maulana, 2008, “*Aliran sexta dan Nabi- nabi Palsu*”, NARASI, Yogyakarta.
- Andi Hamzah,1980,”*Delik-delik tersebar di luar KUHP*”, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1994,”*Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*”, CV ANANTA, Semarang.
- _____, 2008,“*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”,Kencana, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, ”*Metode Penelitian Hukum*”, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Eko Wijayanto, 2008,”*Peranan Kejaksaan Di bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dalam Upaya Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat*”, skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Lexi J Moleong, 1991,”*Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rodaskaarya”,bandung.
- Moch Anwar, 1981, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung
- M. Marwan dan Jimmy. P, 2009,”*Kamus HUKUM*”, REALITY PUBLISHER, Surabaya.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief,2005,” *TEORI-TEORI DAN KEBIJAKAN PIDANA*”, Alumni, Bandung.
- Prakoso Djoko dan Murtika I Ketut, 1987, “*Mengenal Lembaga Kejaksaan Indonesia*”, PT BINA AKSARA, Jakarta.
- R. SUGANDHI, 1981, ”*KUHP DAN PENJELASANYA*”, Usaha Nasional, Surabaya.
- Ronny Hanitijo,1988,”*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, Ghalia Indonesia.

- Sya'roni Ahmadi," *Al-faroidlu Al-Saniyyah*", Madrasah Qudsiiyah", 1401 H,Kudus.
- Buku Ajar, 2007 *PHI "(Pengantar Hukum Indonesia)"*, Universitas Muria Kudus.
- W.Gulo, 2002, "Metodologi Penelitian", Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung
- Yuhaya S. Praja dan Syihabuddin Ahmad, 1982 ,"*Delik Agama Dalam Hukum Pidana Indonesia*", ANGKASA, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan
dan atau Penodaan Agama.

Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan.